TESIS

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA

Nama : Nirmala Sari Dwi Sukma Puteri

No. Mhs : 225214863

Konsentrasi : Litigasi

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Nirmala Sari Dwi Sukma Puteri
Nomor Mahasiswa	: 225212863
Konsentrasi	: Litigasi
Judul Tesis	: KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA

Disetujui oleh :

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. Dr.G.Widiartana, S.H.,M.Hum	15 Juli 2026	
2. Dr. Al.Wisnubroto,S.H.M.Hum	15 Juli 2026	

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM MAGISTER

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama	: Nirmala Sari Dwi Sukma Puteri
Nomor Mahasiswa	: 225212863
Konsentrasi	: Litigasi
Judul Tesis	: KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 22 Juli 2026

Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	Prof. Dr. E.Sundari,S.H.,M.Hum.	
2. Sekretaris	Dr. G. Widiartana,S.H.,M.Hum	
3. Anggota	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASILAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NIRMALA SARI DWI SUKMA PUTERI

No.Mahasiswa : 225214863

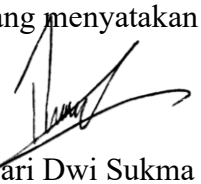
Dengan Ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

”KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 22 Juli 2026

Yang menyatakan :



Nirmala Sari Dwi Sukma Puteri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Kebijakan Kriminal Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan kebijakan hukum pidana dalam penanganan pecandu narkotika di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sisi lain, masih terdapat ketidaksinkronan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan kebijakan kriminal, serta menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih karunia, kesehatan, dan penyertaan-Nya selama proses penyusunan tesis ini.
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Prof. Dr .Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

4. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M , selaku Ketua Program Studi Magister Hukum
5. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan, serta motivasi kepada saya.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan selama saya menempuh pendidikan.
8. Kedua orang tua tercinta serta, Romo & Mamak yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber semangat bagi penulis.
9. My Sistah, Nimsy & Zurie, ledakan energi yang kalian berikan untuk menyemangati hingga Tesisi ini selesai, terimakaish banyak.
10. Sahabat, teman-teman Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
11. Beni Krisdianto yang telah menemani saya dari awal hingga akhir penulisan, banyak bantuan, dukungan, doa dan motivasi dikala saya merasa tidak mampu untuk melanjutkan.
12. @KUKUTIREX, yang selama ini menemani saya menulis ditengah penelitian tesis ini, lewat live DBD-nya saya selalu menadapatkan motivasi dan semangat sampai selesainya penyusunan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, saya berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai kebijakan kriminal terhadap pecandu narkotika di Indonesia.

Yogyakarta, Juli 2026

Penulis,

Nirmala Sari Dwi Sukma Puteri

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan Tesis ii
Halaman Pengesahan iii
Pernyataan Keaslian Tesis iv
Kata Pengantar v
Daftar Isi vi
Abstrak vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21
A. **Tinjauan Pustaka** 21
1. Konsep Kebijakan Kriminal 21
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal 21
b. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) 29
c. Kebijakan Penal 38
d. Kebijakan Non-Penal 42
2. Pecandu Narkotika 42
B. Landasan Teori 44
1. Teori Kepastian Hukum 44
2. Teori Utilitarianisme 46
C. **Batasan Konsep** 49
1. Kebijakan Hukum Pidana 49
2. Pecandu Narkotika 49
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian 51
B. Pendekatan Penelitian 51

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 53
E. Metode Analisis Bahan Hukum 53
F. Metode Penarikan Kesimpulan 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. **Kebijakan Kriminal terhadap Pecandu Narkotika** 55
1. Kebijakan Penal terhadap Pecandu Narkotika 55
2. Kebijakan Non-Penal terhadap Pecandu Narkotika 63
3. Kebijakan Kriminal sebagai Kesatuan Sistem Penanggulangan Pecandu Narkotika .. 65
B. Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Pecandu Narkotika 70
1. Kedudukan Pecandu Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 72
2. Analisis Normatif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 76
3. Analisis Normatif Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 78
4. Analisis Normatif Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 80
5. Analisis Ketidakpastian Hukum antara Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 82
6. Dampak Konflik Norma terhadap Praktik Peradilan 86
a. Disparitas Putusan Hakim terhadap Pecandu Narkotika 87
b. Peran Tim Asesmen Terpadu dalam Penentuan Rehabilitasi 88
c. Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan 90
d. Ketidakpastian Hukum bagi Pecandu Narkotika 91
7. Analisis Ketidakpastian Hukum Berdasarkan Teori Kepastian Hukum 91
8. Analisis Ketidakpastian Hukum Berdasarkan Teori Utilitarianisme 92
a. Kemanfaatan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika 92
b. Rehabilitasi sebagai Instrumen Kebijakan Kriminal 94

C. Analisis Kebijakan Kriminal yang Ideal terhadap Pecandu Narkotika 94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 101

B. Saran 102

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang..... 102

2. Kepada Aparat Penegak Hukum..... 102

DAFTAR PUSTAKA 103

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tumpang tindih pengaturan Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kebijakan kriminal bagi pecandu narkotika yang tertangkap tangan di Indonesia serta mengkaji dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terhadap pecandu narkotika telah mengadopsi sistem double track, namun implementasinya masih diwarnai tumpang tindih norma antara Pasal 54 yang mewajibkan rehabilitasi, Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi, dan Pasal 127 yang tetap mengancam pidana terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Ketiga ketentuan tersebut berlaku dalam satu rangkaian proses peradilan pidana terhadap pecandu narkotika yang tertangkap tangan sehingga menimbulkan konflik norma, perbedaan penafsiran, disparitas putusan hakim, dan ketidakpastian hukum dalam penerapan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan antara Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika serta penguatan kebijakan rehabilitasi melalui parameter yang objektif dan seragam agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan pecandu narkotika.

Kata Kunci: Kebijakan kriminal, pecandu narkotika, rehabilitasi, ketidakpastian hukum, *double track system.*

ABSTRAK

This study aims to analyze the implications of the overlapping provisions of Articles 54, 103, and 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics regarding the criminal policy toward narcotics addicts caught in flagrante delicto in Indonesia and to examine their impact on legal certainty. This research employs normative legal research using a statute approach and a conceptual approach, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings reveal that Indonesia's criminal policy toward narcotics addicts has adopted a double-track system, yet its implementation remains characterized by normative overlap between Article 54, which mandates rehabilitation; Article 103, which grants judges the authority to order rehabilitation; and Article 127, which criminalizes narcotics abuse for personal use. These provisions operate within the same criminal justice process for narcotics addicts caught in flagrante delicto, creating normative conflict, inconsistent legal interpretation, disparities in judicial decisions, and legal uncertainty in the application of rehabilitation. Therefore, harmonization of Articles 54, 103, and 127 of the Narcotics Law, together with the establishment of objective and uniform rehabilitation standards, is necessary to ensure legal certainty, justice, and utility in the treatment of narcotics addicts.

Keywords: criminal policy, narcotics addicts, rehabilitation, legal uncertainty, double track system